



RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2022**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

HALAMAN VERIFIKASI

Rencana Kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022

Catatan :

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2018-2023, dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Sidenreng Rappang, Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan KB

Kabupaten Sidenreng Rappang,

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M. Kes

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19701202 1991031 005

Ikhtisar Eksekutif

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pendek Bidang Kesehatan (RPJP-BK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau, mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, kematian ibu, menurunnya kesakitan karena penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat.

Penyusunan Renja OPD Dinas Kesehatan, Kabupaten Sidenreng Rappang disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 80/ /II/2021 tanggal Pebruari 2021 tentang Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, dengan berdasarkan kepada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renja.

Renja ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kesehatan, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2022 dan Penutup.

Selanjutnya Renja ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan- masukan dan perubahan.

Kata kunci : Pembangunan Kesehatan, Rencana Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 80/73/DINKES/2021

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan maksud dan tujuan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB 2022;
- b. bahwa Renja Dinas Kesehatan tahun 2022 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan RKA/DPA dan sebagai penuntun pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 28. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021.
- KESATU : Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
Pada Tanggal, Juli 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang,



DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M. Kes

Pangkat : Pembina TK.1

NIP: 19701202 1991031 005

DAFTAR ISI

	Hal
Judul	I
Halaman Verifikasi.....	II
Kata Pengantar.....	III
Ikhtisar Eksekutif.....	IV
Keputaus Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 80/ /III/2022/DINKES Tentang Rancangan awal Rencana kerja Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten sidenreng rappang tahun 2023.....	V
Daftar Isi	X
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang,	1
1.2. Landasan Hukum,	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu.....	12
2.2. Analisa kinerjajapelayan PD.....	37
2.3. isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	48
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	49
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	76
3.3. Program dan Kegiatan.....	83
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	93
BAB V. PENUTUP.	111



BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan awal Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Sidenreng Rappang dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor

461);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra dan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023,

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah:

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Sidenreng Rappang, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1. 2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, kewenangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

1. 3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

1. 4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2021). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung

ditujukan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaah terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. 2 Tujuan dan sasaran renja PD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5. 3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2022**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi setiap program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel T-C.2.9 berikut ini.

Table T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	02				Kesehatan									
1	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	88,48	100	90,62	0,91	100	279,1	69,78
1	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100	62,30	100	72,46	0,72	100	234,76	58,69
1	20	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	100	75,10	100	76,04	0,76	100	251,14	62,79
1	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	100	95,44	100	76,57	0,77	100	272,01	68,00
1	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100	85,05	100	61,09	0,61	100	246,14	61,54
1	02	01	01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan KantoR	100	0	100	36,03	0,36	100	136,03	34,01
1	02	01	01	12	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	100	60,69	100	0	0	100	160,69	40,17

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	01	17	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	TersedianyaRapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	100	0	100	83,96	0,84	100	183,96	45,99
1	02	01	01	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	TersedianyaRapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100	99,71	100	92,17	0,92	100	291,88	72,97
1	02	01	01	20	Pelayanan Administrasi perkantoran	Waktu Penyediaancetak,foto copy,makan minum rapat tamu	100	95,13	100	96,74	0,97	100	291,87	72,97
1	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.	100	66,52	100	88,66	0,89	100	255,18	63,80
1	02	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	100	17	100	98,52	0,99	100	215,52	53,88
1	02	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	100	0	100	94,16	0,94	100	194,16	48,54
1	02	01	02	07	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	85,65	100	0	0,00	100	185,65	46,41

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100	0	100	35,63	0,36	100	135,63	33,91
1	02	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	Terpeliharanya halaman gedung dan kantor	100	12,62	100	41,84	0,42	100	154,46	38,62
1	02	01	02	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100	29,91	100	42,36	0,42	100	172,27	43,07
1	02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	0	100	0	0,00	100	100	25,00
1	02	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100	0	100	0	0,00	100	100	25,00
1	02	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100	47,21	100	37,67	0,38	100	184,88	46,22
1	02	02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	45,33	100	40,74	0,41	100	186,07	46,52
1	02	02	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan	100	45,79	100	36,92	0,37	100	182,71	45,68
1	02	02	06	05	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja Keuangan	100	61,74	100	48,37	0,48	100	210,11	52,53

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	06	06	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB	Persentase Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Keluarga Berencana	100	0	100	0	0,00	100	100	25,00
1	02	01	15		ProgramProgram Keluarga Berencana	Persentase Pemenuhan Obat Difasiltas Kesehatan	100	55,22	100	70,85	0,71	100	226,07	56,52
1	02	01	15	01	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim Kb Keliling	Persentase ketersediaan Sarana Mobilitas Tim Kb Keliling	100	55,78	100	71,89	0,72	100	227,67	56,92
1	02	01	15	02	Monitoring Dan Evaluasi Program Keluarga Berencana	Persentase Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Keluarga Berencana	100	38,77	100	57,37	0,57	100	196,14	49,04
1	02	01	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat Difasiltas Kesehatan	100	86,97	100	95,72	0,96	100	282,69	70,67
1	02	01	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat di fasilitas kesehatan tingkat dasar	100	88,88	100	99,80	1,00	100	288,68	72,17
1	02	01	15	02	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemerataan distribusi obat dan BMHP di Fasilitas Kesehatan tingkat dasar	100	65,39	100	82,81	0,83	100	248,2	62,05
1	02	01	15	04	Pembinaan toko Alkes dan PKRT	Jumlah Toko alkes dan PKRT yang di bina	100	0	100	0	0,00	100	100	25,00
1	02	01	15	06	Pemeliharaan dan perbaikan kualitas alat kesehatan	Cakupan Jumlah FKTP yang melakukan pengelolaan obat secara terpadu	100	0	100	29,62	0,30	100	129,62	32,41

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas	100	66,06	100	69,81	0,70	100	235,87	58,97
1	02	01	16	01	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Laboratorium Kesehatan Lingkungan Pemeriksaan depok air minum	100	41,96	100	15,70	0,16	100	157,66	39,42
1	02	01	16	07	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pangkajene	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	47,23	100	80,85	0,81	100	228,08	57,02
1	02	01	16	08	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Amparita	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	31,00	100	38,86	0,39	100	169,86	42,47
1	02	01	16	09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bilokka	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	40,87	100	51,24	0,51	100	192,11	48,03
1	02	01	16	10	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lawawoi	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	35,27	100	47,11	0,47	100	182,38	45,60
1	02	01	16	11	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manisa	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	15,71	100	9,88	0,10	100	125,59	31,40
1	02	01	16	12	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rappang	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	26,09	100	47,40	0,47	100	173,49	43,37
1	02	01	16	13	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Baranti	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	12,66	100	22,34	0,22	100	135	33,75
1	02	01	16	14	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kulo	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	26,78	100	55,31	0,55	100	182,09	45,52

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	16	15	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Empagae	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	14,96	100	23,58	0,24	100	138,54	34,64
1	02	01	16	16	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas lancirang	kebutuhan operasional dan pemeliharaan PKM	100	54,60	100	40,28	0,40	100	194,88	48,72
1	02	01	16	17	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanru Tedong	kebutuhan operasional dan pemeliharaan PKM	100	73,44	100	51,33	0,51	100	224,77	56,19
1	02	01	16	18	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Dongi	kebutuhan operasional dan pemeliharaan PKM	100	36,78	100	33,95	0,34	100	170,73	42,68
1	02	01	16	19	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Barukku	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	46,06	100	47,87	0,48	100	193,93	48,48
1	02	01	16	20	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Belawae	kebutuhan operasional dan pemeliharaan PKM	100	16,71	100	31,35	0,31	100	148,06	37,02
1	02	01	16	21	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas pangkajene	kebutuhan operasional dan pemeliharaan PKM	100	75,75	100	99,78	1,00	100	275,53	68,88
1	02	01	16	22	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas amparita	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	74,72	100	92,07	0,92	100	266,79	66,70
1	02	01	16	23	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas bilokka	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	69,59	100	99,00	0,99	100	268,59	67,15
1	02	01	16	24	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas lawawoi	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	64,25	100	84,12	0,84	100	248,37	62,09
1	02	01	16	25	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas manisa	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	83,12	100	89,26	0,89	100	272,38	68,10

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	16	26	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas rappang	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	76,07	100	81,58	0,82	100	257,65	64,41
1	02	01	16	27	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas baranti	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	87,66	100	98,70	0,99	100	286,36	71,59
1	02	01	16	28	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas kulo	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	71,16	100	98,59	0,99	100	269,75	67,44
1	02	01	16	29	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas empagae	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	59,32	100	67,67	0,68	100	226,99	56,75
1	02	01	16	30	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas lancirang	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	60,16	100	64,03	0,64	100	224,19	56,05
1	02	01	16	31	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas tanru tedong	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	53,06	100	85,56	0,86	100	238,62	59,66
1	02	01	16	32	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas dongi	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	37,95	100	56,63	0,57	100	194,58	48,65
1	02	01	16	33	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas barukku	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	90,07	100	70,81	0,71	100	260,88	65,22
1	02	01	16	34	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas belawae	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	65,75	100	69,48	0,69	100	235,23	58,81
1	02	01	16	35	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas	100	73,47	100	9,97	0,10	100	183,44	45,86

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Opotek Dan Pasar	100	54,47	100	32,84	0,33	100	187,31	46,83
1	02	01	17	01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Meningkatnya kesadaran hukum pelaku ekonomi	100	86,65	100	0	0,00	100	186,65	46,66
1	02	01	17	02	Peningkatan penyelidikan dan Penegakan hukum di bidang obat dan makanan	Berkurangnya produk ilegal yang beredar di pasaran	100	0	100	21,82	0,22	100	121,82	30,46
1	02	01	17	03	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Berkurangnya produk ilegal yang beredar di pasaran	100	18,66	100	39,08	0,39	100	157,74	39,44
1	02	01	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	100	98,67	100	99,31	0,99	100	297,98	74,50
1	02	01	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah Media Promosi	100	97,98	100	100	1,00	100	297,98	74,50
1	02	01	19	03	Peningkatan kesehatan masyarakat Desa & Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100	0	100	99,91	1,00	100	199,91	49,98
1	02	01	19	05	Germas di Masyarakat	Jumlah masyarakat sasaran kegiatan germas	100	0	100	95,28	0,95	100	195,28	48,82
1	02	01	19	06	Sosialisasi Krida Saka Bhakti Husada	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100	0	100	0	0,00	100	100	25,00
1	02	01	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	58,18	100	59,68	0,60	100	217,86	54,47
1	02	01	20	01	Penyusunan Peta informasi Masyarakat Kurang Gizi	Tersedianya data informasi masyarakat kurang gizi	100	99,89	100	99,11	0,99	100	299	74,75
1	02	01	20	02	Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin	Tersedianya Bahan PMT Pemulihan	100	27,82	100	11,00	0,11	100	138,82	34,71

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	20	03	Penanggulangan Kep, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Persentase tingkat ketersediaan Obat gizi	100	98,73	100	87,76	0,88	100	286,49	71,62
1	02	01	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat	100	87,71	100	67,26	0,67	100	254,97	63,74
1	02	01	21	02	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Meningkatnya cakupan kesehatan lingkungan	100	57,95	100	-	0,00	100	157,95	39,49
1	02	01	21	04	Sosialisasi Pengawasan kualitas Air	Jumlah penyelenggaraan air isi ulang yang mendapat pengawasan	100	0	100	100,00	1,00	100	200	50,00
1	02	01	21	05	Peningkatan Kapabilitas petugas kesling	Jumlah petugas kesling yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	0	100	48,24	0,48	100	148,24	37,06
1	02	01	21	06	Kabupaten Sehat	Jumlah kecamatan yang melakukan program Kabupaten Sehat	100	0	100	85,61	0,86	100	185,61	46,40
1	02	01	21	07	Sanitasi total berbasis masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan STBM	100	0	100	61,03	0,61	100	161,03	40,26
1	02	01	21	08	Kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah PKM yang melaksanakan kegiatan Kesehatan kerja dan olahraga	100	0	100	77,75	0,78	100	177,75	44,44
1	02	01	21	09	penyelenggaraan lomba peringatan HKN	Jumlah PKM dan RS yang terlibat dalam peringatan HKN	100	0	100	0	0,00	100	100	25,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Menular	100	83,35	100	66,80	0,67	100	250,15	62,54
1	02	01	22	03	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit	100	84,20	100	40,18	0,40	100	224,38	56,10
1	02	01	22	04	Peningkatan imunisasi	Tersedianya vaksin PKM dan jaringannya	100	98,55	100	91,85	0,92	100	290,4	72,60
1	02	01	22	05	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Mencegah terjadinya KLB Terlaksanya pencegahan & penularan virus	100	78,98	100	69,08	0,69	100	248,06	62,02
1	02	01	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tenaga Dan Sarana Kesehatan Bersertifikat/ Reakreditasi	100	66,82	100	22,43	0,22	100	189,25	47,31
1	02	01	23	06	Akreditasi Puskesmas	jumlah Puskesmas re akreditasi	100	0	100	22,54	0,23	100	122,54	30,64
1	02	01	23	07	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	jumlah laporan pelgelolaan laporan	100	66,82	100	0	0,00	100	166,82	41,71

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/Diperbaiki	100	62,70	100	83,20	0,83	100	245,9	61,48
1	02	01	25	01	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	100	9,24	100	98,66	0,99	100	207,9	51,98
1	02	01	25	02	Pembangunan Poskesdes	Jumlah Poskesdes yang dibangun	100	96,47	100	98,31	0,98	100	294,78	73,70
1	02	01	25	03	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas	100	96,04	100	66,40	0,66	100	262,44	65,61
1	02	01	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	100	90,73	100	90,73	0,91	100	281,46	70,37
1	02	01	26	01	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Jumlah Rumah sakit yang dibangun	100	90,73	100	90,73	0,91	100	281,46	70,37

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	28		Program Kemitraaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	persentase pelayanan kesehatan dengan kemitraan	100	95,96	100	90,51	0,91	100	286,47	71,62
1	02	01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Asuransi Kesehatan	100	99,87	100	97,32	0,97	100	297,19	74,30
1	02	01	28	02	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas pangkajene	Asuransi Kesehatan	100	91,85	100	80,05	0,80	100	271,9	67,98
1	02	01	28	03	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas amparita	Asuransi Kesehatan	100	61,11	100	62,90	0,63	100	224,01	56,00
1	02	01	28	04	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas bilokka	Asuransi Kesehatan	100	66,42	100	66,04	0,66	100	232,46	58,12
1	02	01	28	05	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas lawawoi	Asuransi Kesehatan	100	65,63	100	61,74	0,62	100	227,37	56,84
1	02	01	28	06	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas manisa	Asuransi Kesehatan	100	41,77	100	57,13	0,57	100	198,9	49,73
1	02	01	28	07	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas rappang	Asuransi Kesehatan	100	58,91	100	52,07	0,52	100	210,98	52,75
1	02	01	28	08	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas baranti	Asuransi Kesehatan	100	71,98	100	80,74	0,81	100	252,72	63,18
1	02	01	28	09	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas kulo	Asuransi Kesehatan	100	68,44	100	72,32	0,72	100	240,76	60,19
1	02	01	28	10	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas empagae	Asuransi Kesehatan	100	58,65	100	57,72	0,58	100	216,37	54,09
1	02	01	28	11	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas lancirang	Asuransi Kesehatan	100	62,35	100	64,16	0,64	100	226,51	56,63
1	02	01	28	12	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas tanru tedon	Asuransi Kesehatan	100	68,39	100	63,90	0,64	100	232,29	58,07
1	02	01	28	13	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas dongi	Asuransi Kesehatan	100	42,90	100	64,86	0,65	100	207,76	51,94

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	28	14	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas barukku	Asuransi Kesehatan	100	67,59	100	67,81	0,68	100	235,4	58,85
1	02	01	28	15	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat puskesmas belawae	Asuransi Kesehatan	100	86,90	100	95,64	0,96	100	282,54	70,64
1	02	01	28	16	FKTP Puskesmas Baranti	Asuransi Kesehatan	100	95,36	100	88,45	0,88	100	283,81	70,95
1	02	01	28	17	FKTP Puskesmas Pangkajene	Asuransi Kesehatan	100	89,22	100	91,84	0,92	100	281,06	70,27
1	02	01	28	18	FKTP Puskesmas Dongi	Asuransi Kesehatan	100	89,17	100	82,26	0,82	100	271,43	67,86
1	02	01	28	19	FKTP Puskesmas Tanrutedong	Asuransi Kesehatan	100	89,52	100	91,49	0,91	100	281,01	70,25
1	02	01	28	20	FKTP Puskesmas Lancirang	Asuransi Kesehatan	100	77,85	100	87,57	0,88	100	265,42	66,36
1	02	01	28	21	FKTP Puskesmas Empagae	Asuransi Kesehatan	100	72,63	100	89,58	0,90	100	262,21	65,55
1	02	01	28	22	FKTP Puskesmas Kulo	Asuransi Kesehatan	100	93,98	100	96,34	0,96	100	290,32	72,58
1	02	01	28	23	FKTP Puskesmas Barukku	Asuransi Kesehatan	100	83,59	100	93,01	0,93	100	276,6	69,15
1	02	01	28	24	FKTP Puskesmas Rappang	Asuransi Kesehatan	100	70,40	100	85,95	0,86	100	256,35	64,09
1	02	01	28	25	FKTP Puskesmas Manisa	Asuransi Kesehatan	100	72,44	100	93,34	0,93	100	265,78	66,45
1	02	01	28	26	FKTP Puskesmas Lawawoi	Asuransi Kesehatan	100	80,81	100	86,04	0,86	100	266,85	66,71
1	02	01	28	27	FKTP Puskesmas Bilokka	Asuransi Kesehatan	100	72,82	100	98,10	0,98	100	270,92	67,73
1	02	01	28	28	FKTP Puskesmas Amparita	Asuransi Kesehatan	100	83,71	100	84,36	0,84	100	268,07	67,02
1	02	01	28	29	FKTP Puskesmas Belawae	Asuransi Kesehatan	100	55,60	100	96,09	0,96	100	251,69	62,92
1	02	01	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Meningkatnya pelayanan Kesehatan Anak Balita	100	62,71%	100	96,93%	0,01	100	101,5964	25,40
1	02	01	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga yang dilatih dan pendidikan perawatan anak balita	100	96,93	100	38,31	0,38	100	235,24	58,81

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lansia	100	94,13	100	100	1,00	100	294,13	73,53
1	02	01	30	03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Lansia	Jumlah Tenaga yang dilatih perawatan kesehatan Lansia	100	94,13	100	100	1,00	100	294,13	73,53
1	02	01	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak	Meningkatnya Pelayanan Ibu Melahirkan & Anak	100	77,82	100	99,79	1,00	100	277,61	69,40
1	02	01	32	01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	100	77,82	100	99,79	1,00	100	277,61	69,40
1	02	01	35		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100	0	100	12,98	0,13	100	112,98	28,25
1	02	01	35	02	Pembinaan calon haji	Persentase calon jamaah haji mendapatkan pembinaan	100	0	100	12,98	0,13	100	112,98	28,25
1	02	01	39		Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yg Berperestasi	100	0	100	53,31	0,53	100	153,31	38,33
1	02	01	39	02	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi	Cakupan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti tenaga kesehatan teladan	100	0	100	33,54	0,34	100	133,54	33,39
1	02	01	39	01	Registrasi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.	Cakupan jumlah nakes yang teregistrasi dan mendapatkan pembinaan kesehatan.	100	0	100	67,68	0,68	100	167,68	41,92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019(%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (%)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2021	
									Target Renja Tahun 2020 (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	2	8	25		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rata-Rata Anak Per Keluarga Pasangan Usia Subur	100	0	100	12,28	0,12	100	112,28	28,07
1	2	8	25	01	Jampersal	Tersosialisasinya Program KB	100	0	100	12,28	0,12	100	112,28	28,07

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang sampai akhir Desember 2020, semua program/kegiatan yang dilaksanakan masih ada yang belum memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

Jumlah anggaran belanja (belanja langsung dan tidak langsung) di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.11.515.077.000 dimana Rp. 46.683.090.000 untuk belanja tidak langsung dan sebesar Rp. 64.831.987.00 untuk belanja langsung.

**Realisasi Anggaran Dinas Kesehatn, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020**

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realiasasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	BELANJA	111.515.077.000	96.029.045.876	86,11
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.683.090.000	43.534.130.728	93,25
1	Gaji dan Tunjangan	39.754.711.000	39.452.421.104	99,24
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.658.379.000	2.609.534.058	98,16
3	Insentif Tenaga Kesehatan	4.270.000.000	1.472.175.566	34,48
III	BELANJA LANGSUNG	64.831.987.000	52.494.915.148	80,97
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.953.489.200	5.395.290.936,00	90,62
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	762.748.000	552.718.111	72,46
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	216.800.000	164.843.960	76,04
c	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	58.553.500	44.836.100	76,57
d	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.728.000	7.775.000	61,09
e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	2.882.000	36,03
f	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	-	-
g	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	10.000.000	8.396.000	83,96
h	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	325.345.700	299.860.865	92,17
i	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.459.314.000	4.313.978.900	96,74

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2.424.101.700	2.149.174.000,00	88,66
a	Pembangunan Gedung Kantor	757.500.700	746.327.000	98,52
b	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1.440.500.000	1.356.330.000	94,16
c	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	106.851.000	-	-
d	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	55.500.000	19.773.000	35,63
e	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	50.000.000	20.920.000	41,84
f	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13.750.000	5.824.000	42,36
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	0,00	-
a	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	25.000.000	-	-
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	79.151.000	29.819.800,00	37,67
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	68.495.000	27.907.000	40,74
b	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.600.000	960.000	36,92
c	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.970.000	952.800	48,37
d	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB	6.086.000	-	-
15	Program Keluarga Berencana	3.227.183.000	2.286.551.600,00	70,85
a	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim Kb Keliling	2.995.808.000	2.153.808.750	71,89
b	Monitoring Dan Evaluasi Program Keluarga Berencana	231.375.000	132.742.850	57,37
15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	1.837.417.800	1.758.700.300,00	95,72
a	Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	1.595.465.000	1.592.319.300	99,80
b	Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	178.073.000	147.460.500	82,81
c	Pembinaan toko Alkes dan PKRT	-	-	-
d	Pemeliharaan dan perbaikan kualitas alat kesehatan	63.879.800	18.920.500	29,62

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12.143.439.500	8.477.546.850,00	69,81
a	<i>Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan</i>	26.750.000	4.200.000	15,70
b	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pangkajene</i>	84.199.500	68.075.413	80,85
c	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Amparita</i>	74.403.000	28.912.037	38,86
d	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bilokka</i>	79.921.000	40.947.617	51,24
e	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lawawoi</i>	98.022.000	46.180.914	47,11
f	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manisa</i>	69.798.000	6.894.000	9,88
g	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rappang</i>	71.927.000	34.096.263	47,40
h	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Baranti</i>	112.943.000	25.232.734	22,34
i	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kulo</i>	62.170.000	34.386.749	55,31
j	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Empagae</i>	79.088.000	18.648.620	23,58
k	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lancirang</i>	54.240.000	21.845.877	40,28
l	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanru Tedong</i>	141.772.000	72.772.333	51,33
m	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Dongi</i>	81.772.000	27.765.500	33,95
n	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Barukku</i>	45.872.000	21.961.121	47,87
o	<i>Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Belawae</i>	21.151.000	6.631.862	31,35
p	<i>Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkajene</i>	852.000.000	850.100.000	99,78
q	<i>Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Amparita</i>	705.000.000	649.078.000	92,07
r	<i>Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Bilokka</i>	713.000.000	705.885.000	99,00
s	<i>Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Lawawoi</i>	814.000.000	684.731.600	84,12

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
t	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Manisa	577.000.000	515.031.750	89,26
v	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Rappang	745.000.000	607.768.000	81,58
w	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Baranti	636.000.000	627.714.000	98,70
x	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Kulo	646.000.000	636.899.900	98,59
y	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Empagae	669.000.000	452.723.000	67,67
z	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Lancirang	586.000.000	375.216.000	64,03
a1	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Tanru Tedong	745.000.000	637.431.500	85,56
b1	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Dongi	569.000.000	322.227.500	56,63
c1	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Barukku	602.000.000	426.299.000	70,81
d1	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Belawae	521.840.000	362.563.760	69,48
e1	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan	1.658.571.000	165.326.800	9,97
17	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	252.496.000	82.928.500,00	32,84
	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan	6.248.000	-	-
	Peningkatan Penyidikan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Obat Dan Makanan	77.039.000	16.810.000	21,82
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya	169.209.000	66.118.500	39,08
19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	44.000.000	43.695.000,00	99,31
	Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat	21.600.000	21.600.000	100,00

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan kesehatan masyarakat Desa & Kelurahan	16.260.000	16.245.000	99,91
	Germas di Masyarakat	6.140.000	5.850.000	95,28
	Sosialisasi Krida Saka Bhakti Husada	-	-	
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	584.806.000	348.983.139,00	59,68
	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	15.544.000	15.406.000	99,11
	Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin	216.250.000	23.785.500	11,00
	Penanggulangan Kurang Energi Protein (kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (gaky), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	353.012.000	309.791.639	87,76
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	248.617.000	167.220.500,00	67,26
	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	3.644.000	-	-
	Sosialisasi Pengawasan kualitas Air	5.000.000	5.000.000	100,00
	Peningkatan Kapabilitas petugas kesling	16.590.000	8.002.500	48,24
	Kabupaten Sehat	150.000.000	128.420.000	85,61
	Sanitasi total berbasis masyarakat	16.432.000	10.029.000	61,03
	Kesehatan kerja dan olahraga	20.282.000	15.769.000	77,75
	penyelenggaraan lomba peringatan HKN	36.669.000	-	-
22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	328.286.000	219.288.500,00	66,80
	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	45.650.000	18.342.000	40,18
	Peningkatan Imunisasi	25.000.000	22.962.500	91,85
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	257.636.000	177.984.000	69,08
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.310.106.000	293.875.000,00	22,43
	Akreditasi Puskesmas	1.303.876.000	293.875.000	22,54
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	6.230.000	-	-
25	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	16.064.510.000	13.365.008.352,00	83,20
	Pembangunan Puskesmas	5.901.300.000	5.822.485.001	98,66

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Pembangunan Poskesdes</i>	2.489.560.000	2.447.467.949	98,31
	<i>Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas</i>	7.673.650.000	5.095.055.402	66,40
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	2.515.057.000	2.412.673.005,00	95,93
a	<i>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata</i>	2.515.057.000	2.412.673.005	95,93
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	7.559.196.500	6.842.061.650,00	90,51
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat</i>	5.951.792.000	5.792.171.568	97,32
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pangkajene</i>	126.480.500	101.250.000	80,05
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Amparita</i>	181.928.000	114.441.356	62,90
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bilokka</i>	113.741.000	75.116.690	66,04
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lawawoi</i>	228.297.000	140.953.670	61,74
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manisa</i>	91.749.000	52.413.000	57,13
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rappang</i>	102.478.000	53.364.000	52,07
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Baranti</i>	59.432.000	47.986.254	80,74
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kulo</i>	61.801.000	44.694.621	72,32
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Empagae</i>	124.568.000	71.899.931	57,72
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lancirang</i>	72.603.000	46.580.075	64,16
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanru Tedong</i>	223.260.000	142.658.650	63,90
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Dongi</i>	106.135.000	68.834.475	64,86
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Barukku</i>	72.656.000	49.265.685	67,81
	<i>Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Belawae</i>	42.276.000	40.431.675	95,64

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	9.376.811.600	8.398.990.359	89,57
	FKTP Puskesmas Baranti	533.051.000	471.466.072	88,45
	FKTP Puskesmas Pangkajene	1.716.801.000	1.576.738.397	91,84
	FKTP Puskesmas Dongi	405.657.000	333.684.660	82,26
	FKTP Puskesmas Tanrutedong	946.041.000	865.496.443	91,49
	FKTP Puskesmas Lancirang	433.681.000	379.776.648	87,57
	FKTP Puskesmas Empagae	451.267.600	404.256.800	89,58
	FKTP Puskesmas Kulo	381.788.000	367.817.300	96,34
	FKTP Puskesmas Barukku	514.217.000	478.298.680	93,01
	FKTP Puskesmas Rappang	977.804.000	840.422.313	85,95
	FKTP Puskesmas Manisa	279.129.000	260.545.510	93,34
	FKTP Puskesmas Lawawoi	1.151.934.000	991.118.667	86,04
	FKTP Puskesmas Bilokka	572.797.000	561.918.062	98,10
	FKTP Puskesmas Amparita	900.195.000	759.397.552	84,36
	FKTP Puskesmas Belawae	112.449.000	108.053.255	96,09
29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	17.040.000	6.528.000,00	38,31
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	17.040.000	6.528.000	38,31
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	8.300.000	8.300.000,00	100,00
	Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	8.300.000	8.300.000	100,00
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	57.000.000	56.880.000,00	99,79
	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	57.000.000	56.880.000	99,79
35	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	104.680.000	13.590.000,00	12,98
	Pembinaan calon haji	104.680.000	13.590.000	12,98
36	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	134.918.700	71.926.600,00	53,31
	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Pada Peningkatan Kompetensi	56.795.900	19.050.000	33,54
	Registrasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	78.122.800	52.876.600	67,68
39	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	536.380.000	65.883.057,00	12,28
	Jampersal	536.380.000	65.883.057	12,28

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi keuangan untuk Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 hanya sebesar 86,11%. Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 111.515.077.000 ,- terealisasi sebesar Rp.96.029.045.876,- sehingga anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.15.486.031.124,- Anggaran yang tidak terealisasi tersebut terdiri dari :

1.	Dana Alikasi Khusus (Penugasan)	:	Rp.
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	:	Rp.
3.	Dana Pajak Rokok	:	Rp.
4.	BOK Puskesmas	:	Rp.
5.	Pelayanan umum Puskesmas	:	Rp.
6.	Non Kapitasi Puskesmas	:	Rp.
7.	Klaim puskesmas	:	Rp.
8.	Dana Alokasi Umum (murni)	:	Rp.
9.	Jumlah	:	Rp. 15.486.031.124

Anggaran yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi dan sisa dari pengadaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Kesehatan didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran program dan kegiatan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja perangkat daerah tersebut meliputi:

1. Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan.
2. Persentase Ketersediaan Obat essensial di puskesmas
3. Persentase Sarana Prasarana, Distribusi, Sediaan Farmasi, Perbekalan kesehatan dan produksi pangan sesuai standar.
4. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
5. Persentase Balita Gizi buruk tertangani
6. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM
7. Persentase TPM yang memperoleh Sertifikat Laik Syarat Kesehatan
8. Persentase Tempat-tempat umum yang dibina
9. Jumlah PUSKESMAS terakreditasi;
10. Persentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 75/2014
11. Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
12. Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)
13. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)

14. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
15. Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
16. Proporsi Penderita DBD yang ditangani
17. Persentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap
18. Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85%
19. Persentase Terduga TB Paru yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
20. Persentase angka kasus HIV yang diobati
21. Persentase penderita HIV yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
22. Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun (RPJMD)
23. Persentase orang dengan penyakit Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
24. Persentase orang dengan penyakit Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
25. Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
26. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga pencapaian kinerjanya diukur melalui pencapaian SPM. Tabel 2.2 menggambarkan secara rinci mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel T_C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL (%)	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
	SPM BIDANG KESEHATAN											
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100		100	100	100	100	80	84,4	100	100	
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100		100	100	100	100	97,8	92,1	100	100	
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan pelayanan Kesehatan Balita	100		100	100	100	100	88	86,4	100	100	
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100		100	100	100	100	100	49,7	100	100	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100		100	100	100	100	65,8	39,6	100	100	
7	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100		100	100	100	100	61,7	58,0	100	100	
8	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100		100	100	100	100	63,3	19,2	100	100	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100		100	100	100	100	98,1	36,0	100	100	
10	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100		100	100	100	100	73,6	86,2	100	100	
11	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	100		100	100	100	100	71,6	46,9	100	100	
12	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	100		100	100	100	100	92,7	76,5	100	100	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			80	82	85	90	72,4		85	90	
2	Indeks Kepuasan masyarakat			78	79	80	81	75,72		80	81	
3	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi			100	100	100	100	100		100	100	
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup			0	0	0	0	4		0	0	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									100%	100%	
5	Angka Usia Harapan Hidup			69,61	69,63	69,65	69,70	69,59		69,65	69,70	
6	Persentase Balita Gizi Buruk			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	
7	Prevalensi Balita Gizi Kurang			17	15	13	11	1,86		13	11	
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
8	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			23	22	21	20	23		21	20	
9	Angka kelangsungan hidup bayi			990	991	992	993	900		992	993	
10	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			10	9	8	7	10		8	7	
11	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup			10	9	8	7	10		8	7	
12	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup			10	9	8	7	10		8	7	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
13	Rasio posyandu per satuan balita			1:100	1:90	1:80	1:60	1:100		1:80	1:60	
14	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			1:33.000	1:30.000	1:25.000	1:22.000	1:33.000		1:25.000	1:22.000	
15	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			1:100.657	1:100.657	1:100.657	1:100.000	1:100.657		1:100.657	1:100.000	
16	Rasio dokter per satuan penduduk			1:6.616	1:6.500	1:6.250	1:6.250	1:6.616		1:6.250	1:6.250	
17	Rasio tenaga medis per satuan penduduk			1:9.934	1:9.850	1:9.800	1:9.800	1:9.934		1:9.800	1:9.800	
18	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			100	100	100	100	100		100	100	
19	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan			100	100	100	100	100		100	100	
20	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)			100	100	100	100	100		100	100	
21	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan			100	100	100	100	100		100	100	
22	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)			0	8,5	8,5	8,5	0		8,5	8,5	
23	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak			99	99	100	100	99		100	100	
24	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk			2	2	2	2	2		2	2	
25	Cakupan balita pneumonia yang ditangani			0	90	90	90	0		90	90	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
26	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA			90	90	90	90	90		90	90	
27	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			340	345	350	355	337		350	355	
28	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	
29	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS			80	85	87	90	80		87	90	
30	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS			85	87	90	90	85		90	90	
31	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			100	100	100	100	100		100	100	
32	Penderita diare yang ditangani			8.200	8.250	8.300	8.350	8.153		8.300	8.350	
33	Angka kejadian Malaria			11	11	11	11	11		11	11	
34	Tingkat kematian akibat malaria			20	18	14	10	0		14	10	
35	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida			Sudah Eliminasi Malaria	Sudah Eliminasi Malaria	Sudah Eliminasi Malaria	Sudah Eliminasi Malaria	Sudah Eliminasi Malaria		Sudah Eliminasi Malaria	Sudah Eliminasi Malaria	
36	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat			100	100	100	100	0		100	100	
37	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi			8	7	6	5	0		6	5	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
38	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir			40	45	50	50	0		50	50	
39	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS			40	45	50	50	0		50	50	
40	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			100	100	100	100	100		100	100	
41	Cakupan kunjungan bayi			100	100	100	100	100		100	100	
42	Cakupan puskesmas			100	100	100	100	100		100	100	
43	Cakupan pembantu puskesmas			100	100	100	100	100		100	100	
44	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4			85	88	90	95	80		90	95	
45	Cakupan pelayanan nifas			95	95	95	95	95		95	95	
46	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani			100	100	100	100	100		100	100	
47	Cakupan pelayanan anak balita			100	100	100	100	100		100	100	
48	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin			100	100	100	100	100		100	100	
49	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat			100	100	100	100	100		100	100	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
50	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin			100	100	100	100	100	100	100	100	
51	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			100	100	100	100	100	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB												
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25		1,25	1,25	
2	Total Fertility Rate (TFR)			2	2	2	2	2		2	2	
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB			100	100	100	100	100		100	100	
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk			100	100	100	100	100		100	100	
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk			2	2	2	2	2		2	2	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan			21	21	21	21	21		21	21	
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan			427 KLP	427 KLP	427 KLP	427 KLP	427 KLP		427 KLP	427 KLP	
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga			2	2	2	2	2		2	2	
9	Ratio Akseptor KB			100	100	100	100	100		100	100	
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49			80	80	85	85	54,82		85	85	
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)			40	40	40	40	40		40	40	
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Thn			50	50	50	50	50		50	50	
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)			10	15	17	20	8,86		17	20	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			100	100	100	100	100		100	100	
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi			100	100	100	100	100		100	100	
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			100	100	100	100	100		100	100	
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB			100	100	100	100	100		100	100	
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB			100	100	100	100	100		100	100	
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan			1	1	1	1	1		1	1	
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa			100	100	100	100	100		100	100	
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk			100	100	100	100	100		100	100	
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri			100	100	100	100	100		100	100	
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan			100	100	100	100	100		100	100	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat			85	85	85	90	85		85	90	
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan			100	100	100	100	100		100	100	
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa			85	90	95	100	80		95	100	
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)			20	22	22	22	10		22	22	
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga			85	85	85	90	85		85	90	
29	Rata-rata usia kawin pertama wanita			20	20	20	20	20		20	20	
30	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes			1,25	1,25	1,30	1,30	1,20		1,30	1,30	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi utama urusan pemerintahan yang meliputi fungsi bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga Berencana. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang perlu mendapatkan penanganan pada tahun 2021 adalah terkait kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, promosi dan pemberdayaan masyarakat, penyakit menular dan tidak menular, keterbatasan sumber daya kesehatan. Selain itu, permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak.
2. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan
3. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban ganda penyakit.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal
5. Belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat
6. Belum terpenuhinya standar pelayanan di puskesmas dan rumah sakit
7. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
8. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
9. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi

kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diupayakan dapat mendukung optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan melalui Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, Peningkatan Upaya Promosi dan pemberdayaan Kesehatan, Peningkatan sarana prasarana kesehatan dalam rangka perluasan cakupan pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, Dana ALokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik, DBH dsb, Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, anggaran belanja yang dialokasi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp.167.096.956.095,- yang terbagi dalam 5 program kesehatan (20 kegiatan dan 83 sub kegiatan), 3 Program pengendalian penduduk dan KB (9 kegiatan dan 28 sub kegiatan). Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel T-C.3.1:

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				167.096.956.095					168.767.925.664	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	56.385.095.607	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	56.385.095.607	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	88.224.712	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	88.224.712	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	1 Dokumen	30.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	1 Dokumen	30.300.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	17.129.600	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	17.129.600	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	7.067.980	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	7.067.980	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	12.559.956	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	12.559.956	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	7.051.416	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	7.051.416	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	1 Dokumen	7.049.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	1 Dokumen	7.049.800	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	1 Dokumen	7.065.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	1 Dokumen	7.065.960	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	44.007.334.180	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	44.007.334.180	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	1 Dokumen	43.923.851.620	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	1 Dokumen	43.923.851.620	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen laporan hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia	1 Dokumen	41.062.560	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen laporan hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia	1 Dokumen	41.062.560	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	1 Dokumen	3.535.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	1 Dokumen	3.535.000	
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	1 Dokumen	1.515.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	1 Dokumen	1.515.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD yang tersedia	3 Dokumen	37.370.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD yang tersedia	3 Dokumen	37.370.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	88.170.980	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	88.170.980	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersedia	1 Dokumen	6.694.280	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersedia	1 Dokumen	6.694.280	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	1 Dokumen	34.307.680	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersedia	1 Dokumen	34.307.680	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 ASN	47.169.020	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 ASN	47.169.020	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	858.725.735	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	858.725.735	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Tim penilaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	2 TIM	10.076.770	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Tim penilaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	2 TIM	10.076.770	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	2	848.648.965	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	2	848.648.965	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor	100%	476.940.180	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor	100%	476.940.180	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Jenis	23.075.470	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 Jenis	23.075.470	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	20 enis	120.458.660	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	20 enis	120.458.660	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis	6.060.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis	6.060.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	26 jenis	22.708.840	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	26 jenis	22.708.840	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	12 Bulan	16.822.560	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	12 Bulan	16.822.560	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah buln Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	12 Bulan	287.814.650	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah buln Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	12 Bulan	287.814.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.747.736.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.747.736.900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	12 Bulan	884.295.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	12 Bulan	884.295.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	9.590.441.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	9.590.441.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah	100%	390.962.920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah	100%	390.962.920	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	245 Kendaraan	55.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	245 Kendaraan	55.550.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	245 Kendaraan	138.010.440	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	245 Kendaraan	138.010.440	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	5	107.916.480	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	5	107.916.480	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	4	57.279.120	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	4	57.279.120	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	3	32.206.880	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	3	32.206.880	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Sidenreng Rappang	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	100%	103.414.804.610	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Sidenreng Rappang	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	100%	103.414.804.610	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	100%	90.614.203.990	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia	100%	90.614.203.990	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	1 Unit	50.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	1 Unit	50.000.000.000	
	Pembangunan Puskesmas	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang terbangun	3 Unit	20.623.390.990	Pembangunan Puskesmas	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang terbangun	3 Unit	20.623.390.990	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	10 unit	2.652.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	10 unit	2.652.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	8 Unit	2.121.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	8 Unit	2.121.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di Rehabilitasi dan mendapat Pemeliharaan	10 Unit	5.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang di Rehabilitasi dan mendapat Pemeliharaan	10 Unit	5.000.000.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	30 motor 3 puskel 2 ipal	3.667.914.990	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	30 motor 3 puskel 2 ipal	3.667.914.990	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 PKM	761.534.950	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 PKM	761.534.950	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	130 Jenis Obat	1.535.507.402	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	130 Jenis Obat	1.535.507.402	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	25 Jenis BHP	2.226.590.088	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	25 Jenis BHP	2.226.590.088	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	14 PKM	201.855.570	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	14 PKM	201.855.570	
02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.745.512.190	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.745.512.190	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.945 ibu hamil	195.796.580	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.945 ibu hamil	195.796.580	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.608 Ibu Bersalin	469.541.930	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.608 Ibu Bersalin	469.541.930	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.403 Bayi	140.631.390	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.403 Bayi	140.631.390	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.902 Balita	111.619.140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.902 Balita	111.619.140	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.192 siswa	45.906.520	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.192 siswa	45.906.520	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193.400 orang	142.877.630	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193.400 orang	142.877.630	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.808 Usia Lanjut	103.223.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.808 Usia Lanjut	103.223.010	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.592 Orang	153.131.150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.592 Orang	153.131.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.734 Orang	90.754.560	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.734 Orang	90.754.560	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	38.936.510	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	38.936.510	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.725 orang	162.819.070	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.725 orang	162.819.070	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.677 orang	142.930.150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.677 orang	142.930.150	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	14 PKM	520.005.570	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	14 PKM	520.005.570	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	40159 Orang	650.262.240	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	40159 Orang	650.262.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	55 Pos UKK 14 Puskesmas	96.253.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	55 Pos UKK 14 Puskesmas	96.253.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sidenreng Rappang	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	583.265.910	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Sidenreng Rappang	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	583.265.910	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah tangga berperilaku Hidup bersih dan sehat	41.483 rumah tangga	198.844.760	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah tangga berperilaku Hidup bersih dan sehat	41.483 rumah tangga	198.844.760	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14 PKM	22.159.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14 PKM	22.159.400	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	200 Orang	88.482.060	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	200 Orang	88.482.060	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	14 PKM	72.588.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	14 PKM	72.588.700	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	17.919 orang	819.119.090	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	17.919 orang	819.119.090	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.500 Orang	5.977.672.880	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.500 Orang	5.977.672.880	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1.400 orang	51.992.780	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	1.400 orang	51.992.780	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	14 PKM	19.484.920	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	14 PKM	19.484.920	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	11 Kec.	297.757.595	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	11 Kec.	297.757.595	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	14 PKM	112.740.240	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang mendapat Biaya Operasional Pelayanan Puskesmas	14 PKM	112.740.240	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 PKM	5.813.560	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 PKM	5.813.560	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	8 PKM	790.381.560	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	8 PKM	790.381.560	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	14 PKM	491.517.005	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	14 PKM	491.517.005	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	14 PKM	15.368.160	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	14 PKM	15.368.160	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100%	55.088.430	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100%	55.088.430	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 PKM 1 Dinkes	55.088.430	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 PKM 1 Dinkes	55.088.430	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	100%	335.361.410	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan	100%	335.361.410	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP	85%	33.178.500	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP	85%	33.178.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	400 Orang	33.178.500	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	400 Orang	33.178.500	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	216.738.930	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	216.738.930	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di faskes	50 orang	216.738.930	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di faskes	50 orang	216.738.930	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota	100%	85.443.980	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah nakes yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota	100%	85.443.980	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah nakes yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.225 orang	85.443.980	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah nakes yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.225 orang	85.443.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100%	761.920.770	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100%	761.920.770	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100%	323.817.110	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	100%	323.817.110	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	110 sarana	323.817.110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	110 sarana	323.817.110	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat	100%	135.473.320	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat	100%	135.473.320	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	10 sarana	45.544.940	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah RT	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan RT yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	10 sarana	45.544.940	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah sarana Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan	10 sarana	89.928.380	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah sarana Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan	10 sarana	89.928.380	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikasi Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT	100%	184.334.090	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikasi Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri RT	100%	184.334.090	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikat Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95 PIRT	184.334.090	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi o/IRT	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapat pengawasan dan sertifikat Produksi pangan, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95 PIRT	184.334.090	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan	100%	118.296.250	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman IRT		Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan	100%	118.296.250	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	95 PIRT	118.296.250	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	95 PIRT	118.296.250	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	100%	321.458.760	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	100%	321.458.760	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	272.116.220	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masy	100%	272.116.220	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	225 Posyandu aktif	272.116.220	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	225 Posyandu aktif	272.116.220	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	100%	42.694.720	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	100%	42.694.720	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	41.483 Rumah tangga	42.694.720	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	41.483 Rumah tangga	42.694.720	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	6.647.820	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	6.647.820	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	150 UKBM	6.647.820	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	150 UKBM	6.647.820	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menambah program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang lainnya. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat usulan program/kegiatan. Untuk tahun 2022 ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang terlihat pada tabel T-C.32. berikut :

Tabel T-C .32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dusun II amessangeng, Kab. Sidenreng Rappang	MESIN FOGGING (ALAT SEMPROT NYAMUK)	1 Unit	Pengadaan /Pengembangan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Dusun I Larumpu, Kab. Sidenreng Rappang	Pemeliharaan Saran dan Prasarana PUSTU	1 Unit	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU)
		Panreng Rijang & Panreng Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) terhadap kesehatan jiwa dan Bahaya NARKOBA	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Lingkungan Cilellang dan Orai Salo, Kab. Sidenreng Rappang	Penyuluhan dan Pencegahan Penyakit Menular Terhadap Masyarakat	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		lingkungan 3 Wala & Lingkungan 7 botto libu, Kab. Sidenreng Rappang	Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) terhadap resiko Terinfeksi HIV	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		jl pendidikan lingkungan 2 salopalakka, Kab. Sidenreng Rappang	Pelayanan Kesehatan bergerak	1 Unit	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Makkawarue, Kab. Sidenreng Rappang	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS) di Masyarakat	1 Unit	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Dusun Mario, Kab. Sidenreng Rappang	Pelatihan Kader Posyandu	1 Unit	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2022**

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Dalam Program Pembangunan Kesehatan, Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Standar Nasional (berlaku Umum secara Nasional) maka seyogyanya semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten harus menjabarkan kembali Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ini, menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi dan kemudian dijabarkan kembali menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota, tentunya yang disesuaikan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempatnya.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”*. Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk

mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

a. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut :

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		Terjaminnya pembiayaan kesehatan

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan dan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya diparitas status kesehatan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial	Masih tingginya angka kematian ibu (MMR), prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, cakupan pertolongan persalinan masih rendah	- Kurangnya ketrampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir yang bermasalah - Terlambat penemuan kasus - Penanganan kasus belum adekuat - Orang tua kurang kooperatif	- Digalakkannya kemitraan bidan dan dukun - Pemantauan ketat melalui call centre dinas kesehatan - Adanya jampersal - Adanya PMT bagi gizi buruk - Pelaksanaan posyandu yang maksimal - Adanya Program keluarga sadar gizi
2	Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan standar Pelayanan Minimal	Dari beberapa Indikator SPM, Masih ada beberapa indicator yang belum mencapai standart	- Masih rendahnya kualitas pendidikan nakes - Terbatasnya jumlah dan jenis nakes dan Penyebaran yang belum merata - Kurangnya pembiayaan di bidang kes. - Kurangnya pemenuhan alat dan perbekalan kesehatan	- Adanya dana BOK dan JKN

B. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Renstra Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan satu misinya adalah akses pelayanan kesehatan. Dan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menjabarkannya dalam VISI “**Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter**”

Misinya :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan perencanaan strategis dalam jangka waktu lima tahun adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter, dengan berdasarkan dengan tujuan strategis yang di jabarkan dalam sasaran strategis perencanaan jangka menengah yakni “meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

Isu strategisnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Kesehatan
4. Pencapaian SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs)
5. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita Stunting
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Era Revolusi Industri 4.0 (Era Digital / Teknologi Informasi

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah kondisi kesehatan masyarakatnya. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 68,69 tahun pada tahun 2016 menjadi 69,15 tahun pada tahun 2019, dan pencapaian keseluruhan sasaran SDGs tahun 2025. Perubahan dibidang kesehatan diperlukan mengingat adanya fenomena utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan, antara lain Perubahan-perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang mendorong transisi demografis dan epidemiologi, tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas serta pesatnya revolusi dalam bidang informasi, telekomunikasi dan transparansi, temuantemuan substansial dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup, sehat, sakit dan mati, perubahan lingkungan mempengaruhi derajat dan upaya kesehatan, demokratisasi disegala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan.

Memasuki abad ke 21 yang merupakan era persaingan bebas antar bangsa, sektor kesehatan harus mampu meningkatkan derajat kesehatan yang nantinya akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja, dan pada akhirnya akan mempertajam daya saing bangsa. Oleh karena itu pembangunan kesehatan membutuhkan suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Karena tujuan umum dari pembangunan kesehatan adalah terciptanya perilaku dan lingkungan yang sehat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang mandiri dalam memelihara kesehatan, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang sehat, kreatif dan produktif untuk menunjang pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi, angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, jamban keluarga pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat dalam mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai macam program dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Masalah keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan merupakan tantangan yang harus segera diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi yaitu anak bayi, anak usia balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya pentingnya hidup sehat salah satu program yang harus dijalankan adalah peningkatan penggunaan air bersih untuk minum (air kemasan, leding, pompa sumur dalam, sumur terlindungi dan mata air terlindung).

Sasaran pembangunan kesehatan yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah; meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat, terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat, dan tertanggulangnya wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa, meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya yang beredar dalam lingkungan masyarakat, meningkatnya manajemen pembangunan kesehatan, terwujudnya tenaga kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna dan tersedianya sarana dan prasarana dan dukungan logistik yang memadai.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus

diberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana kerja dengan berpedoman pada Rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. *Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan* dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan uraian diatas maka Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tidak lagi memasukkan visi dan misi karena mengikuti visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Oleh karena itu dalam hal ini setiap Perangkat Daerah harus menjabarkan perencanaan kerjanya langsung ke dalam tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

daerah RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, yaitu :

Misi ke-1 (RPJMD) :

Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat

Tujuan (RPJMD) :

Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat

Sasaran Pembangunan Daerah (RPJMD) :

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Tujuan dalam rancangan awal RENJA ini diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.25

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMD yakni Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka ditetapkan tujuan utama berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu :
“*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*” yang optimal dengan indikator tujuan “*meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup*” bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yaitu “ *Mewujudkan keluarga berkualitas yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia* “ dengan indikator tujuan “ *Angka kelahiran Total /Total fertility Rate (TFR) Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.*

B. Sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator

secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 1 (Satu) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang yakni tahun 2022.

1. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. *Sasaran 1 : Meningkatnya Kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup
 - 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
 - 3. Prevalensi Balita Gizi Kurang
 - 4. Persentase Balita Gizi Buruk
- b. *Sasaran 2 : Meningkatnya pencegahan & pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang terinfeksi HIV)
 - 2. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
 - 3. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
- c. *Sasaran 3 : Meningkatnya Sumber Daya kesehatan dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
 - 2. Persentase rumah sakit terakreditasi
 - 3. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
 - 4. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
 - 5. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

- a. *Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kelahiran Total dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Rata-rata jumlah anak perkeluarga
- b. *Sasaran 2 : Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi dengan indikator sasaran sebagai berikut :*
 - 1. Ratio Akseptor KB

Mengacu uraian di atas maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel TC- 3.2.a
Tujuan, Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Estmasi Maju Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
			2022	2023
1	2	3	7	8
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				
1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		1. Usia Harapan Hidup (UHH)	69,98	70,04
	1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	2. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	205	194
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	18,6	17,6
		4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	18,4	16
		5. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	14	13

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
			2022	2023
1	2	3	7	8
	2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	6 Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	< 1	< 1
		11. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	340	340
		12. Kejadian Malaria per 1000 orang.	1/1000	1/1000
	3. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	9. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100
		10. Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100
		11. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	83	83
		12. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	80	80
		13. Indeks Kepuasan masyarakat (%)	79	80

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
			2022	2023
1	2	3	7	8
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.		1. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,07	2,05
	1. Menurunnya Angka Kelahiran Total	2. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,1	2
	2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	3. Ratio Akseptor KB	55.89	56,28

Pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkesinambungan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program, kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2022 berdasarkan permendagri No.90 tahun 2019 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
6. Program pengendalian penduduk
7. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
8. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

A. Program dan Kegiatan Rutin

1. Program

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2. Kegiatan

- 1) *Kegiatan 1* : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) *Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan***
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) *Kegiatan 03 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan***
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) *Kegiatan 05 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan***
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) *Kegiatan 06 : Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- Sub Kegiatan***
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 6) *Kegiatan 08* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) *Kegiatan 09* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) *Kegiatan 10* : Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas)

Sub Kegiatan

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas)

B. Program dan Kegiatan Prioritas

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- 1) *Kegiatan 01* : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2. Pembangunan Puskesmas
3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
6. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

8. Pengadaan Obat, Vaksin
 9. Pengadaan Bahan Habis Pakai
 10. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 11. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2) *Kegiatan 02 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
21. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
24. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

25. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
26. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
27. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
28. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
29. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
30. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

- 3) *Kegiatan 03* : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

- 4) *Kegiatan 04* : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 01* : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) *Kegiatan 02* : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 3) *Kegiatan 03* : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
- 1) *Kegiatan 01* : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) *Kegiatan 02* : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) *Kegiatan 03* : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 4) *Kegiatan 06* : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

- 1) *Kegiatan 1* : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 3) *Kegiatan 3* : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

- 1) *Kegiatan 01* : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- 2) *Kegiatan 02* : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
3. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
4. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
5. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- 1) *Kegiatan 01* : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- 2) *Kegiatan 02* : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan

1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 3) *Kegiatan 03* : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 6. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 7. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 8. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 9. Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 4) *Kegiatan 04* : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

Sub Kegiatan

1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
2. Pembinaan Terpadu Kampung KB

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

- 1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 4. Sosialisasi IPK
 5. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
- 2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2022**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang kesehatan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 dan hasil review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020;
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
2. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 8 program, 38 kegiatan dan 213 Sub kegiatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebesar Rp. 188.563.450.300,- yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Program dan kegiatan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana termuat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Table T-C.33.

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Dina Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Kb Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				106.139.263.620				116.753.189.982
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	50.649.642.020			100%	55.714.606.222
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	38.014.400			100%	41.815.840
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	6.440.000	DAU		1 Dokumen	7.084.000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	6.400.000	DAU		1 Dokumen	7.040.000
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	4.500.000	DAU		1 Dokumen	4.950.000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	6.274.800	DAU		1 Dokumen	6.902.280
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	7.314.800	DAU		1 Dokumen	8.046.280

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	3.640.000	DAU		1 Dokumen	4.004.000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	3.444.800	DAU		1 Dokumen	3.789.280
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	43.944.719.620			100%	48.339.191.582
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	43.923.851.620	DAU		1 Dokumen	48.316.236.782
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen laporan hasil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	44.721.600	DAU		1 Dokumen	49.193.760
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	3.850.000	DAU		1 Dokumen	4.235.000
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	1.650.000	DAU		1 Dokumen	1.815.000
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	3 Dokumen	18.000.000	DAU		3 Dokumen	19.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	30.028.000			100%	33.030.800
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	6.628.000	DAU		1 Dokumen	7.290.800
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersdia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	18.000.000	DAU		1 Dokumen	19.800.000
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	2 ASN	5.400.000	DAU		2 ASN	5.940.000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	181.156.000			100%	199.271.600
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Tim penilaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	Kab. Sidenreng Rappang	2 TIM	247.000	DAU		2 TIM	271.700
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang- Undangan yang di sosialisasikan	Kab. Sidenreng Rappang	2	180.909.000	DAU		2	198.999.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor		100%	455.524.000			100%	501.076.400
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	12 Jenis	8.000.000	DAU		12 Jenis	8.800.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	20 enis	127.500.000	DAU		20 enis	140.250.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	10 jenis	2.000.000	DAU		10 jenis	2.200.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	26 jenis	22.484.000	DAU		26 jenis	24.732.400
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	13.540.000	DAU		12 Bulan	14.894.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	282.000.000	DAU		12 Bulan	310.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	5.853.200.000			100%	6.438.520.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	650.000.000	DAU		12 Bulan	715.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	5.203.200.000	DAU		12 Bulan	5.723.520.000
1.02.01.2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah		100%	147.000.000			100%	161.700.000
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	Kab. Sidenreng Rappang	245 Kendaraan	12.000.000	DAU		245 Kendaraan	13.200.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kab. Sidenreng Rappang	245 Kendaraan	30.000.000	DAU		245 Kendaraan	33.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	Kab. Sidenreng Rappang	5	40.000.000	DAU		5	44.000.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	4	45.000.000	DAU		4	49.500.000
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	3	20.000.000	DAU		3	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		100%	48.597.100.300			100%	53.456.810.330
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia		100%	33.347.402.250			100%	36.682.142.475
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Kec. Dua Pitue	1 Unit	1.000.000.000	DAU		1 Unit	1.100.000.000
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	20.495.375.000	DAK FISIK		3 Unit	22.544.912.500
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	5.000.000.000	DAK FISIK		10 Unit	550.000.000
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Kab. Sidenreng Rappang	8 Unit	500.000.000	DAK FISIK		8 Unit	550.000.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di Rehabilitasi dan mendapat Pemeliharaan	Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	1.326.505.000	DAK FISIK		5 Unit	1.459.155.500
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	30 Motor	3.557.000.000	DAK FISIK		30 Motor	3.912.700.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	1.522.704.358	DAK FISIK		14 PKM	1.674.974.794

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	130 Jenis Obat	2.204.507.892	DAK FISIK		135 Jenis Obat	2.424.958.681
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	25 Jenis BHP	152.700.000	DAK FISIK		30 Jenis BHP	167.970.000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	172.846.000	DAK FISIK		14 PKM	190.130.600
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	15.230.964.050			100%	16.754.060.455
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	5.945 ibu hamil	186.890.000	DAK NON FISIK		5.958 ibu hamil	205.579.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	6.608 Ibu Bersalin	1.656.257.400	DAK NON FISIK		6.572 Ibu Bersalin	1.821.883.140
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	5.403 Bayi	57.822.600	DAK NON FISIK		5.414 Bayi	63.604.860
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	24.902 Balita	77.317.000	DAK NON FISIK		24.952 Balita	85.048.700
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	54.192 siswa	107.711.800	DAK NON FISIK		54.192 siswa	118.482.980
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	193.400 orang	166.452.000	DAK NON FISIK		194.892 orang	183.097.200
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	20.808 Usia Lanjut	140.602.000	DAK NON FISIK		20.808 Usia Lanjut	154.662.200
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	17.592 Orang	32.193.000	DAK NON FISIK		17.810 Orang	35.412.300
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	2.734 Orang	112.838.000	DAK NON FISIK		2.768 Orang	124.121.800
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	600 Orang	55.450.000	DAK NON FISIK		550 Orang	60.995.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	5.725 orang	124.618.000	DAK NON FISIK		5.839 orang	137.079.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Sidenreng Rappang	7.677 orang	132.447.500	DAK NON FISIK		7.663 orang	145.692.250
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	44.514.950	DAK NON FISIK		14 PKM	48.966.445
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	40159 Orang	2.244.407.000	DAK NON FISIK		40159 Orang	2.468.847.700
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	Kab. Sidenreng Rappang	55 Pos UKK 14 Puskesmas	43.752.000	DAU		55 Pos UKK 14 Puskesmas	48.127.200
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	Kab. Sidenreng Rappang	1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	750.141.600	DAK NON FISIK		1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	825.155.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berprilaku Hidup bersih dan sehat	Kab. Sidenreng Rappang	41.483 rumah tangga	197.101.000	DAK NON FISIK		44.934 rumah tangga	216.811.100
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	15.830.000	DAU		14 PKM	17.413.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	722.246.400	DAU		14 PKM	794.471.040
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	200 Orang	37.551.800	DAU		200 Orang	41.306.980
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	13.919.000	DAU		14 PKM	15.310.900
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Sidenreng Rappang	17.919 orang	460.843.000	DAU		17.919 orang	506.927.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	14.500 Orang	5.318.488.000	DAU		14.500 Orang	5.850.336.800
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Sidenreng Rappang	1.400 orang	50.126.000	DAU		1.400 orang	55.138.600
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	30.000.000	DAU		14 PKM	33.000.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Sidenreng Rappang	11 Kec.	35.535.000	DAU		11 Kec.	39.088.500
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	30.000.000	DAK NON FISIK		14 PKM	33.000.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	Kab. Sidenreng Rappang	8 PKM	1.126.393.000	DAK NON FISIK		5 PKM	1.239.032.300
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	1.304.300.000	DAK NON FISIK		14 PKM	1.434.730.000
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	15.216.000	DAU		14 PKM	16.737.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		100%	18.734.000			100%	20.607.400
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	18.734.000	DAU		14 PKM 1 Dinkes	20.607.400
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Memdaapat Pembinaan dan Pengawasan		100%	88.700.000			100%	97.570.000
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	Kab. Sidenreng Rappang	17 Unit	88.700.000	DAU		17 Unit	97.570.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan		100%	247.116.000			100%	271.827.600
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitas mendapatkan SIP		85%	7.200.000			90%	7.920.000
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	400 Orang	7.200.000	DAU		400 Orang	7.920.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%	40.028.000			100%	44.030.800
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	50 orang	40.028.000	DAU		50 orang	44.030.800
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	199.888.000			100%	219.876.800
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2.225 orang	199.888.000	DAU		2.190 orang	219.876.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin		100%	180.957.000			100%	199.052.700
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin		100%	19.600.000			100%	21.560.000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	Kab. Sidenreng Rappang	110 sarana	19.600.000	DAU		115 sarana	21.560.000
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat		100%	44.232.000			100%	48.655.200
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	Kab. Sidenreng Rappang	10 sarana	44.232.000	DAU		10 sarana	48.655.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan		100%	117.125.000			100%	128.837.500
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Sidenreng Rappang	95 PIRT	117.125.000	DAU		100 PIRT	128.837.500
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		100%	1.443.464.900			100%	1.587.811.390
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		100%	916.244.900			100%	1.007.869.390
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	225 Posyandu aktif	916.244.900	DAU		243 posyandu aktif	1.007.869.390
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat		100%	25.000.000			100%	27.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	41.483 Rumah tangga	25.000.000	DAU		44.934 Rumah tangga	27.500.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100%	502.220.000			100%	552.442.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Sidenreng Rappang	150 UKBM	502.220.000	DAU		155 UKBM	552.442.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)		100%	253.687.000			100%	279.055.700
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		100%	27.476.000			100%	30.223.600
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Sidenreng Rappang	26 OPD	-	DAU		26 OPD	-
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah OPD yang terlibat dalam Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Sidenreng Rappang	26 OPD	27.476.000	DAU & DAK BOKB		26 OPD	30.223.600
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten		100%	226.211.000			100%	248.832.100
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang di bemtuk di setiap Kampung KB	Kab. Sidenreng Rappang	15 rumah data	102.071.000	DAU & DAK BOKB		15 rumah data	112.278.100
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA)	Kab. Sidenreng Rappang	1 kali	2.000.000	DAU		1 kali	2.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Sidenreng Rappang	26 OPD	20.000.000	DAU		26 OPD	22.000.000
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	23.970.000	DAU		1 Dokumen	26.367.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	78.170.000	DAU & DAK BOKB		1 Dokumen	85.987.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB		100%	4.013.255.000			100%	4.414.580.500
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		100%	1.297.269.000			100%	1.426.995.900
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Sidenreng Rappang	11 Balai KB	817.476.000	DAK BOKB		11 Balai KB	899.223.600
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Sidenreng Rappang	11 Balai KB	67.353.000	DAU & DAK BOKB		11 Balai KB	74.088.300
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Sidenreng Rappang	11 Balai KB	412.440.000	DAK FISIK		11 Balai KB	453.684.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK		100%	1.168.800.000			100%	1.285.680.000
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK	Kab. Sidenreng Rappang	106 PKB	508.800.000	DAK BOKB		106 PKB	559.680.000
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Sidenreng Rappang	11 Balai KB	430.000.000	DAK FISIK		11 Balai KB	473.000.000
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	Kab. Sidenreng Rappang	106 PKB	30.000.000	DAU		106 PKB	33.000.000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK	Kab. Sidenreng Rappang	444 kader	200.000.000	DAU		444 kader	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB		100%	979.817.000			100%	1.077.798.700
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Sidenreng Rappang	17 faskes	32.012.000	DAK BOKB		17 faskes	35.213.200
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Sidenreng Rappang	17 faskes	30.000.000	DAU		17 faskes	33.000.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Sidenreng Rappang	43966 PUS	31.000.000	DAU		43966 PUS	34.100.000
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Sidenreng Rappang	17 faskes	267.333.000	DAK FISIK		17 faskes	294.066.300
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Sidenreng Rappang	17 faskes	9.350.000	DAK BOKB		17 faskes	10.285.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompetensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi	Kab. Sidenreng Rappang	17 faskes	49.500.000	DAU		17 faskes	54.450.000
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi & SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Sidenreng Rappang	17 faskes	79.200.000	DAU		17 faskes	87.120.000
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Sidenreng Rappang	17 faskes	698.500.000	DAK BOKB		17 faskes	768.350.000
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	Kab. Sidenreng Rappang	11 Balai KB	11.000.000	DAK BOKB		11 Balai KB	12.100.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB		100%	567.369.000			100%	624.105.900
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Kader yang mendapatkan pelatihan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Kab. Sidenreng Rappang	449 kader	20.000.000	DAU		454 kader	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Sidenreng Rappang	15 Kampung KB	547.369.000	DAK BOKB		15 Kampung KB	602.105.900
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga		100%	754.041.400			100%	829.445.540
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	516.022.900			100%	567.625.190
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS	Kab. Sidenreng Rappang	106 desa/kel	500.000.000	DAU		106 desa/kel	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS	Kab. Sidenreng Rappang	320 Klp	5.000.000	DAU		320 Klp	5.500.000
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Sidenreng Rappang	320 Klp	6.111.500	DAU		320 Klp	6.722.650
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	Kab. Sidenreng Rappang	11 Kec	2.803.900	DAU		11 Kec	3.084.290
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kab. Sidenreng Rappang	11 Kec	2.107.500	DAU		11 Kec	2.318.250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		100%	401.500.000			100%	441.650.000
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kelompok yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (perayaan Hari Keluarga Nasional(HARGANAS) Provinsi dan Pusat	Kab. Sidenreng Rappang	320 Klp	264.000.000	DAU		320 Klp	290.400.000
	TOTAL :				104.253.499.620				114.678.849.582



BAB V

PENUTUP

RENCANA KERJA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2022**

BAB V.

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan kesehatan dan pengendalian penduduk tahun 2022.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan serta sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan dan Pengendalian penduduk yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan dan pengendalian penduduk yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di bidang kesehatan dan pengendalian penduduk di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

[illegible]

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The lines are light gray and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Rencana Kerja

**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022**

**di Editing
oleh**

**Bagian Perencanaan
Sekretariat**

**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021**

